



**SALINAN**

WALIKOTA JAMBI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
  - b. bahwa guna mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi, perlu dibentuk produk hukum daerah yang mengatur tentang Kerja Sama Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMADAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah (Kota) adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Jambi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
7. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
8. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja sama wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki urusan eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
10. Kerja sama sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
11. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

13. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Mitra Kerja Sama adalah Pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
15. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
16. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
17. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi-materi yang akan dikerjasamakan.
18. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerja sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau *Memorandum of Understanding (MoU)*.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
20. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Wali Kota sebagai surat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Wali Kota kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.

## Pasal 2

- (1) Maksud Kerja Sama Daerah sebagai upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi Daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli Daerah.
- (2) Walikota dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
- a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga diluar negerisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah:

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama; dan
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.

### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerjasama meliputi seluruh urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan umum pembangunan nasional dan Daerah.
- (3) Aset dan/atau potensi yang dimiliki Daerah mulai dari penyiapan perencanaan kebijakan pembangunan, pengaturan maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.

### Pasal 5

Kerja Sama Daerah berasaskan :

- a. kesepakatan;
- b. kebebasan berkontrak;
- c. itikad baik;
- d. kekuatan mengikat; dan
- e. keseimbangan.

## Pasal 6

Kerja Sama Daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. keadilan; dan
- j. kepastian hukum.

## BAB II

### KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) KSDD dikategorikan menjadi Kerja Sama Wajib dan Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Daerah Kabupaten lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki urusan lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan daerah Kabupaten/Kota lain baik yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

#### Bagian Kedua

#### Objek Kerja Sama

#### Pasal 8

- (1) Objek KSDD merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
  1. pendidikan;
  2. kesehatan;
  3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  6. sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
  1. tenaga kerja;
  2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3. pangan;
  4. pertanahan;
  5. lingkungan hidup;
  6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. perhubungan;
  10. komunikasi dan informatika;
  11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  12. penanaman modal;
  13. kepemudaan dan olah raga;
  14. statistik;
  15. persandian;
  16. kebudayaan;
  17. perpustakaan; dan
  18. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
  1. kelautan dan perikanan;
  2. pariwisata;
  3. pertanian;
  4. kehutanan;
  5. energi dan sumber daya mineral;
  6. perdagangan;
  7. perindustrian; dan
  8. transmigrasi.

## Bagian Ketiga

### Pemetaan

#### Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan KSDD yang bersifat wajib, dilakukan pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sesuai potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama-sama dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai jangka waktu kerja sama dan skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama di provinsi, untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
- (5) Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.

## Bagian Keempat

### Tahapan Kerja Sama

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
  - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
  - e. persetujuan DPRD;
  - f. penyusunan perjanjian kerja sama;
  - g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kelima



## Berakhirnya Kerja Sama

### Pasal 11

- (1) KSDD berakhir karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
  - b. tujuan KSDD telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
  - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
  - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Keenam

### Bantuan Kerja Sama Antar Daerah

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan keuangan kepada Daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada perangkat daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (2) Bantuan keuangan kepada Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada Daerah untuk melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk Bantuan Keuangan atau Hibah.

## BAB III

### KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

#### Bagian Kesatu

#### Studi Kelayakan

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:
  - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
  - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun.

- (3) Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
  - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang memprakarsai KSDPK harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan Kerja Sama

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
  - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
  - e. persetujuan DPRD;
  - f. penyusunan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama;
  - g. penandatanganan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDPK diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketiga

#### Berakhirnya Kerja Sama

#### Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.

- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
- a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

### KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. promosi potensi daerah; dan
  - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam naskah kerja sama.

#### Pasal 18

KSDPL terdiri atas:

- a. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
- b. kerja sama lainnya.

#### Pasal 19

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Persyaratan

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai hubungan diplomatik;
  - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
  - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
  - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
- a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
  - b. saling melengkapi; dan
  - c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

#### Pasal 22

Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL selain berpegang pada prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 juga harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu stabilitas politik dan perekonomian;
- b. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
- d. mendukung pengarusutamaan gender; dan
- e. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Prakarsa

##### Pasal 23

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
  - a. pemerintah Daerah;
  - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
  - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
  - a. pemerintah Daerah; atau
  - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui menteri dalam negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota melakukan peninjauan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Wali Kota melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
- (5) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

##### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDPL dan KSDLL diatur dalam Peraturan Walikota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Pelaporan Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL

##### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaporan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Berakhirnya Kerja Sama  
Pasal 26

Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL.

BAB V  
NASKAH KERJA SAMA  
Bagian Kesatu  
Struktur Kesepakatan Bersama  
Pasal 27

- (1) Struktur Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL terdiri dari :
  - a. komparisi;
  - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama KSDPK;
  - c. premis (*recital*);
  - d. konsideran;
  - e. isi Kesepakatan Bersama, paling kurang memuat:
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek kesepakatan bersama;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. jangka waktu;
    6. surat-menyurat;
    7. lain-lain; dan
  - f. penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Struktur Perjanjian/Kontrak Kerja Sama  
Pasal 28

- (1) Struktur Perjanjian/Kontrak Kerja Sama dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL terdiri dari :
  - a. komparisi;
  - b. para pihak dalam Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPK;
  - c. premis (*recital*);
  - d. konsideran;

- e. isi Perjanjian/Kontrak Kerja Sama, paling kurang memuat:
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. hak dan kewajiban para pihak;
    6. pembiayaan;
    7. jangka waktu;
    8. penyelesaian perselisihan (*dispute settlement*);
    9. keadaan kahar (*force majeure*); dan
    10. pengakhiran kerjasama (*termination*).
  - f. penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur Perjanjian/Kontrak Kerja Sama dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Penggunaan Lambang/Logo

##### Pasal 29

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, mencantumkan Lambang Garuda pada bagian atas.
- (2) Naskah PKS KSDD yang ditandatangani oleh Pejabat yang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk menandatangani, mencantumkan Lambang Daerah Pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan Lambang Daerah Mitra pada bagian atas di sebelah kiri.
- (3) Dalam hal Daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), Lambang Daerah Pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan Lambang Daerah Mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.

##### Pasal 30

Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPK, menggunakan Lambang Daerah dan Logo pihak ketiga.

##### Pasal 31

Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPL, menggunakan Lambang Daerah dan Lambang Pemerintah Daerah di Luar Negeri.

## Pasal 32

Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama dan KSDLL, menggunakan Lambang Daerah dan Logo Lembaga di Luar Negeri.

## BAB VI

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 33

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, pemerintah daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada kepala daerah yang melakukan KSDD.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, TKKSD kabupaten/kota menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD provinsi.
- (2) TKKSD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyelesaian yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kabupaten/kota yang melakukan KSDD.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh TKKSD Provinsi, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri.
- (2) Menteri melakukan penyelesaian perselisihan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementrian/ Lembaga Teknis yang terkait.
- (3) Hasil Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bersifat final dan mengikat daerah yang berselisih.



### Pasal 36

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda, daerah yang berselisih menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.
- (2) Menteri melakukan penyelesaian perselisihan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementrian/Lembaga teknis yang terkait.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bersifat final dan mengikat daerah yang berselisih.

### Pasal 37

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 38

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

### Pasal 39

- (1) Dalam menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah, dibentuk TKKSD.
- (2) Pembentukan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 40

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;

- d. Beranggotakan:
1. Anggota tetap paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan; dan
  2. Anggota tidak tetap, yaitu perangkat daerah yang melaksanakan kerja sama daerah dan/atau terkait dengan pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi TKKSD, dibentuk Sekretariat TKKSD.

#### Pasal 41

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan KSDD, KSDPK serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah, sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKKSD mempunyai fungsi:
- a. menyusun pemetaan kerja sama daerah;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses kerja sama daerah serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek KSDD dan KSDPK;
  - e. menilai proposal dan studi kelayakan KSDD dan KSDPK dari Pemrakarsa;
  - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dan/atau dokumen KSDD dan KSDPK lainnya;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah;
  - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK;
  - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD dan KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
  - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Wali Kota dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ditembuskan kepada DPRD terhadap kerja sama yang membebani masyarakat dan Daerah.

#### Pasal 42

TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.

#### Pasal 43

- (1) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah;
  - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
  - c. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah.

#### Pasal 44

- (1) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua TKKSD.
- (2) Dalam hal Ketua TKKSD berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

#### Pasal 45

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setiap saat, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
  - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen kerja sama daerah lainnya;
  - b. menyusun program kerja TKKSD;
  - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan

- d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen kerja sama daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh kepala daerah dan/atau pejabat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Rapat Teknis dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh anggota.
- (2) Dalam hal Sekretaris TKKSD berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat Kerja Sama

#### Pasal 47

- (1) Walikota dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
  - a. dilakukan secara terus-menerus;
  - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
  - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang berkerjasama.

#### Pasal 48

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) bertugas:
  - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
  - b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Daerah pada perangkat daerah dilakukan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX  
DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
  - a. persiapan;
  - b. penawaran sinergi;
  - c. penyusunan nota kesepakatan dan rencana kerja;
  - d. persetujuan DPRD;
  - e. penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja;
  - f. pelaksanaan;
  - g. penatausahaan; dan
  - h. pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerjasama.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal, 28 Januari 2021  
WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi  
Pada tanggal 28 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI :( 3-4 /2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA JAMBI

ttd

AMIRULLAH, SH  
Pembina T.k I  
NIP. 19650929 199602 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan kerja sama diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Kerja sama pada dasarnya dapat membebani anggaran sebagai modal awal untuk memperoleh hasil, atau sama sekali tidak membebani anggaran daerah dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat pula hanya menggunakan atau memanfaatkan barang yang dimiliki daerah tanpa menggunakan dana APBD.

Tata Kelola Kerja Sama daerah memerlukan landasan yang kuat sebagai dasar untuk implementasinya, diperlukannya peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah sebagai payung hukum bagi tindakan pemerintahan dalam bidang kerja sama dan dengan adanya peraturan daerah tentunya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap kerja sama yang akan dilakukan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “Objek KSDD hilang atau musnah” adalah bahwa objek tersebut hilang atau musnah akibat keadaan kahar (force majeure).

Yang dimaksud dengan “tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan” adalah bahwa kerja sama daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepala daerah maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah di luar negeri” adalah unit pemerintahan yang identik dengan pemerintahan daerah di dalam negeri;

Yang dimaksud dengan “lembaga di luar negeri” adalah organisasi/lembaga yang berkedudukan di luar negeri, seperti Perserikatan Bangsa-bangsa dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas



Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 Januari 2021

TENTANG : KERJA SAMA DAERAH

STRUKTUR KESEPAKATAN BERSAMA KSDD DAN KSDPK

JUDUL MUATAN

Struktur Naskah Kerja Sama

A. Kesepakatan Bersama KSDD

1. Komparisi

Komparisi adalah bagian Kesepakatan Bersama yang meliputi:

- a. Judul Kesepakatan Bersama yang menjelaskan tentang judul Kesepakatan Bersama yang akan ditandatangani.
- b. Nomor Kesepakatan Bersama. Apabila Kesepakatan Bersama dibuat berupa perubahan Kesepakatan Bersama, maka Kesepakatan Bersama harus diberi urutan sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.
- c. Tanggal Kesepakatan Bersama, yang menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh para Pihak.
- d. Kalimat pembuka yang menjelaskan bahwa para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tertentu membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama.

2. Para Pihak dalam Kesepakatan Bersama

- a. Menjelaskan identitas para Pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama. Identitas para Pihak meliputi : nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para Pihak dalam Kesepakatan Bersama tersebut, apakah sebagai Pihak Kesatu atau Pihak Kedua dan seterusnya.
- b. Para Pihak dalam Kesepakatan Bersama terdiri dari Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan seterusnya.
- c. Menjelaskan bahwa para Pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan atas dasar apa ia bertindak. Dalam penandatanganan Kesepakatan Bersama, Daerah harus diwakili oleh Kepala Daerah. Termasuk dalam hal ini adalah Penjabat, Penjabat Sementara, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian Kepala Daerah.

3. Premis

- a. Premis merupakan penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya Kesepakatan Bersama berupa pertimbangan-pertimbangan umum. Pada bagian ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang terjadinya Kesepakatan Bersama, selain itu premis merupakan bagian yang menjawab pertanyaan apa sebab kerjasama itu dibuat serta yang menyatakan adanya sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan.

- b. Pada bagian ini sebaiknya memuat petunjuk bahwa setelah melalui proses penawaran, penerimaan tawaran dan negosiasi, para Pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama. Bagian ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan “konsiderans menimbang” dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Secara umum, premis terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu premis major berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi Kesepakatan Bersama atau proses Kesepakatan Bersama, dan premis minor berupa alasan hukum, kondisi umum dan latar belakang dibentuknya Kesepakatan Bersama.

#### 4. Konsideran

Bagian ini merupakan pernyataan dari para Pihak berdasarkan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setelah mempertimbangkan premis mayor dan premis minor, untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama.

#### 5. Isi Kesepakatan Bersama

##### a. Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah klausul yang menggambarkan apa yang melatarbelakangi diselenggarakannya KSDD.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah hasil akhir yang diinginkan dari pelaksanaan KSDD.

##### b. Objek Kesepakatan Bersama

Objek Kesepakatan Bersama dalam KSDD adalah Urusan atau Kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah batasan mengenai apa yang disepakati oleh para pihak akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

##### d. Pelaksanaan

Dalam pasal yang mengatur tentang pelaksanaan, pada umumnya berisi pentahapan kerja sama, pembagian peran dari para pihak, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja sama secara umum.

##### e. Jangka Waktu

Klausul jangka waktu menunjukkan waktu mulai berlaku sampai berakhirnya Kesepakatan Bersama. Pembatasan jangka waktu diperlukan untuk :

- 1) Menghindari berlakunya suatu Kesepakatan Bersama yang tidak memberikan manfaat secara terus menerus;
- 2) Sebagai sarana evaluasi, dalam arti Kesepakatan Bersama yang tidak memberikan manfaat tidak perlu diperbarui; dan
- 3) Memudahkan proses renegotiasi klausul Kesepakatan Bersama yang kurang menguntungkan.

##### f. Surat-Menyurat

- 1) Dalam pasal tentang surat-menyurat, dijelaskan siapa yang menjadi perwakilan para pihak dalam pelaksanaan kerja sama dan administrasi surat-menyurat, sehingga komunikasi dan informasi diantara para pihak selama jangka waktu kerja sama, dapat berjalan dengan baik.

- 2) Dalam pasal ini, diatur pula dengan cara apa komunikasi dan informasi disampaikan oleh masing-masing pihak, termasuk keharusan para pihak untuk memberitahukan pihak lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat.

g. Lain-Lain

- 1) Dalam pasal ini dapat diatur bahwa pelaksanaan kerja sama tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara para pihak.
- 2) Disamping itu, dapat diatur pula apa yang akan disepakati oleh para pihak, dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau kondisi-kondisi di luar keadaan kahar (*force majeure*), yang tidak memungkinkan terselenggaranya kerja sama.

## 6. Penutup

Bagian ini mengakhiri batang tubuh Kesepakatan Bersama dengan identitas para pihak serta hal-hal lain yang dianggap perlu dimuat, untuk memberikan keabsahan yuridis pada Kesepakatan Bersama. Pada bagian akhir Kesepakatan Bersama, dimuat berbagai informasi penutup, meliputi:

- a. Tanggal dan tempat penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh para pihak (apabila hal ini belum disebutkan di bagian pembukaan);
- b. Kolom-kolom untuk tandatangan para pihak atau wakil-wakil resmi dari para pihak;
- c. Cap/stempel dari para pihak. Ketentuan mengenai pembubuhan cap/stempel berlaku apabila pihak mitra Pemerintah Daerah adalah badan hukum, badan usaha, perguruan tinggi negeri-badan hukum (PTN-BH), perguruan tinggi swasta, dan lembaga kemasyarakatan, kecuali perorangan; dan
- d. Materai yang ditempelkan pada ruang yang disediakan untuk tandatangan para pihak.

## B. Kepakatan Bersama KSDPK

### 1. Komparisi

Komparisi adalah bagian Kesepakatan Bersama yang meliputi:

- a. Judul Kesepakatan Bersama yang menjelaskan tentang judul Kesepakatan Bersama yang akan ditandatangani.
- b. Nomor Kesepakatan Bersama. Apabila Kesepakatan Bersama dibuat berupa perubahan Kesepakatan Bersama, maka Kesepakatan Bersama harus diberi urutan sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.
- c. Tanggal Kesepakatan Bersama, yang menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh para Pihak.
- d. Kalimat pembuka yang menjelaskan bahwa para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tertentu membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama.

### 2. Para Pihak dalam Kesepakatan Bersama

- a. Menjelaskan identitas para Pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama. Identitas para Pihak meliputi : nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para Pihak dalam Kesepakatan Bersama tersebut, apakah sebagai Pihak Kesatu atau Pihak Kedua dan seterusnya.

- b. Para Pihak dalam Kesepakatan Bersama terdiri dari Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan seterusnya.
- c. Menjelaskan bahwa para Pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan atas dasar apa ia bertindak. Dalam penandatanganan Kesepakatan Bersama, Daerah harus diwakili oleh Kepala Daerah. Termasuk dalam hal ini adalah Penjabat, Penjabat Sementara, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian Kepala Daerah. Adapun yang mewakili Pihak Ketiga, adalah Direktur Utama atau yang setara dengan jabatan Direktur Utama, atau yang ditunjuk dalam Anggaran Dasar mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
- d. Apabila Pihak Kedua merupakan suatu konsorsium, perusahaan patungan (*joint venture*) atau bentuk kerjasama lainnya harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin serta yang mewakili kerja sama tersebut.

### 3. Premis (*Recital*)

- a. Premis merupakan penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya Kesepakatan Bersama, berupa pertimbangan-pertimbangan umum. Pada bagian ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang terjadinya Kesepakatan Bersama, selain itu premis merupakan bagian yang menjawab pertanyaan apa sebab kerjasama itu dibuat serta yang menyatakan adanya sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan
- b. Pada bagian ini sebaiknya memuat petunjuk bahwa setelah melalui proses penawaran, penerimaan tawaran dan negosiasi (*offer, acceptance, and negotiations*), para Pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama. Bagian ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan “konsiderans menimbang” dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Secara umum, premis terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu premis major berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi Kesepakatan Bersama atau proses Kesepakatan Bersama, dan premis minor berupa alasan hukum, kondisi umum dan latar belakang dibentuknya Kesepakatan Bersama.

### 4. Konsideran

Bagian ini merupakan pernyataan dari para Pihak berdasarkan kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing, setelah mempertimbangkan premis mayor dan premis minor, untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam rangka KSDPK.

### 5. Isi Kesepakatan Bersama

#### a. Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah klausul yang menggambarkan apa yang melatarbelakangi diselenggarakannya KSDPK.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah hasil akhir yang diinginkan dari pelaksanaan KSDPK.

#### b. Objek Kesepakatan Bersama

Objek Kesepakatan Bersama KSDPK pada prinsipnya terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu benda dan tak benda (aktivitas).

#### c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah batasan mengenai apa yang disepakati oleh para pihak akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

d. Pelaksanaan

Dalam pasal yang mengatur tentang pelaksanaan, pada umumnya berisi pentahapan kerja sama, pembagian peran dari para pihak, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja sama secara umum.

e. Jangka Waktu

Klausul jangka waktu menunjukkan waktu mulai berlaku sampai berakhirnya Kesepakatan Bersama. Pembatasan jangka waktu diperlukan untuk :

- 1) Menghindari berlakunya suatu Kesepakatan Bersama yang tidak memberikan manfaat secara terus menerus;
- 2) Sebagai sarana evaluasi, dalam arti Kesepakatan Bersama yang tidak memberikan manfaat tidak perlu diperbarui; dan
- 3) Memudahkan proses renegotiasi klausul Kesepakatan Bersama yang kurang menguntungkan.

f. Surat-Menyurat

- 1) Dalam pasal tentang surat-menyurat, dijelaskan siapa yang menjadi perwakilan para pihak dalam pelaksanaan kerja sama dan administrasi surat-menyurat, sehingga komunikasi dan informasi diantara para pihak selama jangka waktu kerja sama, dapat berjalan dengan baik.
- 2) Dalam pasal ini, diatur pula dengan cara apa komunikasi dan informasi disampaikan oleh masing-masing pihak, termasuk keharusan para pihak untuk memberitahukan pihak lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat.

g. Lain-Lain

- 1) Dalam pasal ini dapat diatur bahwa pelaksanaan kerja sama tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara para pihak.
- 2) Disamping itu, dapat diatur pula apa yang akan disepakati oleh para pihak, dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau kondisi-kondisi di luar keadaan kahar (*force majeure*), yang tidak memungkinkan terselenggaranya kerja sama.

6. Penutup

Bagian ini mengakhiri batang tubuh Kesepakatan Bersama dengan identitas para pihak serta hal-hal lain yang dianggap perlu dimuat, untuk memberikan keabsahan yuridis pada Kesepakatan Bersama. Pada bagian akhir Kesepakatan Bersama, dimuat berbagai informasi penutup, meliputi:

- a. Tanggal dan tempat penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh para pihak (apabila hal ini belum disebutkan di bagian pembukaan);
- b. Kolom-kolom untuk tandatangan para pihak atau wakil-wakil resmi dari para pihak;
- c. Cap/stempel dari para pihak. Ketentuan mengenai pembubuhan cap/stempel berlaku apabila pihak mitra Pemerintah Daerah adalah badan hukum, badan usaha, perguruan tinggi negeri-badan hukum

(PTN-BH), perguruan tinggi swasta, dan lembaga kemasyarakatan, kecuali perorangan; dan

d. Materai yang ditempelkan pada ruang yang disediakan untuk tandatangan para pihak.

I. Contoh Format Naskah Kerja Sama

1. Contoh Format Kesepakatan Bersama KSDD



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAHDAERAH .....  
DAN  
PEMERINTAHDAERAH .....  
TENTANG

.....

NOMOR : .....

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.-.-.-.), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. .... : .....,  
..... (nama tanpa gelar) berkedudukan di....., Jalan ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. .... : .....,  
..... (nama tanpa gelar) berkedudukan di....., Jalan ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. .... dst
2. .... dst
3. .... dst



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

.....  
.....  
.....

Pasal 2

.....

.....  
.....  
.....

Pasal 3

.....

.....  
.....  
.....

Pasal 4

.....

.....  
.....  
.....

Pasal ..

dan seterusnya

.....  
.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Tanda tangan dan Stempel

Tanda tangan dan Stempel

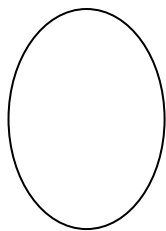
.....

.....

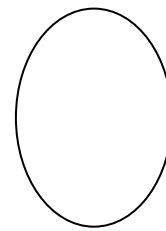
(nama tanpa gelar)

(nama tanpa gelar)

2. Contoh Format Kesepakatan Bersama KSDPK



Lambang Daerah



Logo Pihak Ketiga

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH .....  
DAN  
.....  
TENTANG  
.....  
NOMOR : .....

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. .... : .....,  
..... (nama tanpa gelar) berkedudukan di....., Jalan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. .... : .....,  
..... (nama tanpa gelar) berkedudukan di....., Jalan ....., berdasarkan Anggaran Dasar PT. .... yang dibuat di hadapan Notaris ....., yang telah disahkan oleh Menteri ..... berdasarkan Keputusan Nomor ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ...., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. .... dst
- 2. .... dst
- 3. .... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

.....  
.....  
.....

Pasal 2

.....  
.....  
.....

Pasal 3

.....  
.....  
.....

Pasal 4

.....  
.....  
.....

Pasal ..  
dan seterusnya

.....  
.....  
.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di .....  
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai  
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Cap dan Tanda tangan

Cap dan Tanda tangan

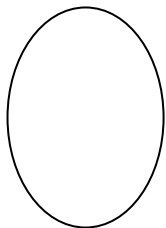
.....

.....

(nama tanpa gelar)

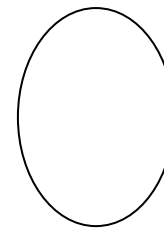
(nama tanpa gelar)

3. Contoh Format Kesepakatan Bersama KSDPL



Lambang Daerah

Lambang Daerah



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAHDAERAH .....  
DAN  
PEMERINTAHDAERAH .....  
TENTANG

.....

NOMOR : .....

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. .... : .....,  
..... (nama tanpa gelar) berkedudukan di....., Jalan .....  
....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. .... : .....,  
..... (nama tanpa gelar) berkedudukan di....., Jalan .....  
....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. .... dst
- 2. .... dst
- 3. .... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

.....  
.....  
.....

Pasal 2

.....

.....  
.....  
.....

Pasal 3

.....

.....  
.....  
.....

Pasal 4

.....

.....  
.....  
.....

Pasal ..

dan seterusnya

.....  
.....  
.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di .....  
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai  
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Tanda tangan dan Stempel

Tanda tangan dan Stempel

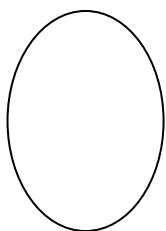
.....

.....

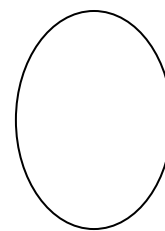
(nama tanpa gelar)

(nama tanpa gelar)

4. Contoh Format Kesepakatan Bersama KSDLL



Lambang Daerah



Logo Lembaga

KESEPAKATAN BERSAMA  
 ANTARA  
 PEMERINTAH DAERAH .....  
 DAN  
 .....  
 TENTANG  
 .....

NOMOR : .....

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. .... : .....,  
 ..... (nama tanpa gelar) berkedudukan di....., Jalan .....  
 ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. .... : .....,  
 ..... (nama tanpa gelar) berkedudukan di....., Jalan .....  
 ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. .... dst
- 2. .... dst
- 3. .... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

.....  
.....  
.....

Pasal 2

.....

.....  
.....  
.....

Pasal 3

.....

.....  
.....  
.....

Pasal 4

.....

.....  
.....  
.....

Pasal ..

dan seterusnya

.....  
.....  
.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di .....  
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai  
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Cap dan Tanda tangan

Cap dan Tanda tangan

.....

.....

(nama tanpa gelar)

(nama tanpa gelar)

5. Contoh Format Dokumen Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Pusat dan Daerah



KESEPAKATAN  
SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/INSTANSI  
VERTIKAL .....  
DAN  
PEMERINTAHDAERAH .....  
TENTANG

.....

NOMOR : .....

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. .... : .....,  
..... (nama tanpa gelar) berkedudukan di....., Jalan .....  
....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian .....  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. .... : .....,  
..... (nama tanpa gelar) berkedudukan di....., Jalan .....  
....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. .... dst
2. .... dst
3. .... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

.....  
.....  
.....

Pasal 2

.....

.....  
.....  
.....

Pasal 3

.....

.....  
.....  
.....

Pasal 4

.....

.....  
.....  
.....

Pasal ..

dan seterusnya

.....  
.....  
.....

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di .....  
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai  
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Cap dan Tanda tangan

Cap dan Tanda tangan

.....

.....

(nama tanpa gelar)

(nama tanpa gelar)

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR : TAHUN 2021  
TANGGAL : 2021  
TENTANG : KERJA SAMA DAERAH

STRUKTUR PERJANJIAN/KONTRAK KERJA SAMA KSDD DAN KSDPK

PKS KSDD

1. Komparisi

Komparisi adalah bagian PKS yang meliputi:

- a. Judul PKS yang menjelaskan tentang judul PKS yang akan ditandatangani.
- b. Nomor PKS. Apabila PKS dibuat berupa perubahan PKS, maka PKS harus diberi urutan sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.
- c. Tanggal PKS, yang menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun PKS ditandatangani oleh para Pihak.
- d. Kalimat pembuka yang menjelaskan bahwa para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tertentu membuat dan menandatangani PKS.

2. Para Pihak dalam PKS

- a. Menjelaskan identitas para Pihak yang menandatangani PKS KSDD. Identitas para Pihak meliputi : nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para Pihak dalam PKS tersebut, apakah sebagai Pihak Kesatu atau Pihak Kedua dan seterusnya.
- b. Para Pihak dalam PKS terdiri dari Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan seterusnya.
- c. Menjelaskan bahwa para Pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan atas dasar apa ia bertindak. Dalam penandatanganan PKS, Daerah pada hakekatnya diwakili oleh Kepala Daerah, Penjabat, Penjabat Sementara, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian Kepala Daerah. Namun demikian Kepala Daerah dapat menguasakannya kepada salah seorang Pejabat berdasarkan Surat Kuasa.

3. Premis

- a. Premis merupakan penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya PKS KSDD, berupa pertimbangan-pertimbangan umum. Pada bagian ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang terjadinya PKS, selain itu premis merupakan bagian yang menjawab pertanyaan apa sebab kerjasama itu dibuat serta yang menyatakan adanya sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan.
- b. Pada bagian ini sebaiknya memuat petunjuk bahwa setelah melalui proses penawaran, penerimaan tawaran dan negosiasi, para Pihak sepakat untuk mengadakan PKS. Bagian ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan “konsiderans menimbang” dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Secara umum, premis terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu premis major berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi Kesepakatan Bersama atau proses PKS, dan

premis minor berupa alasan hukum, kondisi umum dan latar belakang dibentuknya PKS.

#### 4. Konsideran

Bagian ini merupakan pernyataan dari para Pihak berdasarkan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setelah mempertimbangkan premis mayor dan premis minor, untuk melaksanakan PKS KSDD.

#### 5. Isi PKS

##### a. Maksud dan Tujuan

1) Maksud PKS KSDD adalah klausul yang menggambarkan apa yang melatarbelakangi diselenggarakannya KSDD. Dalam hal masih relevan, klausul maksud dalam PKS KSDD dapat mengacu pada naskah Kesepakatan Bersama.

2) Tujuan PKS KSDD adalah hasil akhir yang diinginkan dari pelaksanaan KSDD. Dalam hal masih relevan, klausul tujuan dalam PKS KSDD dapat mengacu pada naskah Kesepakatan Bersama.

##### b. Objek

Bagian ini merupakan pernyataan dari para Pihak berdasarkan kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing, setelah mempertimbangkan premis mayor dan premis minor, untuk melaksanakan PKS KSDD.

##### c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PKS KSDD adalah batasan mengenai apa yang disepakati oleh para pihak akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

##### d. Pelaksanaan

Dalam pasal yang mengatur tentang pelaksanaan, pada umumnya berisi pentahapan pelaksanaan kerja sama, pembagian peran dari para pihak, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Persiapan dan pelaksanaan kerja sama secara umum.

##### e. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban menguraikan secara rinci hak dan kewajiban dari para Pihak yang diatur dalam PKS antar Daerah. Klausul hak dan kewajiban memberikan hak untuk menuntut prestasi dari Pihak mitra sekaligus dituntut oleh Pihak mitra untuk melakukan prestasi. Rincian mengenai hak dan kewajiban para Pihak adalah bagian yang merupakan perumusan sesungguhnya dari suatu kerja sama.

Hubungan antara hak dan kewajiban serta hubungan antara perangkat hak dan kewajiban dari para Pihak seyogianya merupakan hubungan yang logis. Oleh karena itu, perangkat hak adalah berbanding terbalik dengan perangkat kewajiban, walaupun hubungannya tidak linear. Pada umumnya, perangkat hak dan kewajiban salah satu Pihak berbanding terbalik dengan perangkat hak dan kewajiban Pihak lainnya.

##### f. Pembiayaan

Pasal ini mengatur klausul mengenai sumber pembiayaan untuk pelaksanaan dan seluruh pentahapan kerja sama, termasuk masalah pembayaran atau kontribusi yang harus dibayar oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya.

##### g. Jangka Waktu

Klausul jangka waktu menunjukkan waktu mulai berlaku sampai berakhirnya PKS. Pembatasan jangka waktu diperlukan untuk :

- 1) Menghindari berlakunya suatu PKS yang tidak memberikan manfaat secara terus menerus;
- 2) Sebagai sarana evaluasi, dalam arti PKS yang tidak memberikan manfaat tidak perlu diperbarui; dan
- 3) Memudahkan proses renegotiasi klausul PKS yang kurang menguntungkan.

h. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan dalam KSDD dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Bab V Bagian Kelima, Pasal 33 sampai dengan Pasal 35.

i. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Kausa atau penyebab keadaan kahar (*force majeure*) dalam KUH Perdata terdiri dari :

- 1) Keadaan kahar (*force majeure*) karena sebab-sebab yang tidak terduga

Jika terjadi hal-hal yang tidak terduga sebelumnya oleh para Pihak yang menyebabkan terjadinya kegagalan melaksanakan PKS, maka hal tersebut tidak tergolong kepada wanprestasi, akan tetapi termasuk ke dalam kategori keadaan kahar (*force majeure*). Terhadap kejadian seperti ini, Debitur atau pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Beban pembuktian terhadap terjadinya sebab-sebab tak terduga ini ada pada Debitur. Jika Debitur dapat dibuktikan dalam keadaan beritikad buruk, maka meskipun dalam keadaan keadaan kahar (*force majeure*), Debitur tetap harus bertanggungjawab atas kegagalannya memenuhi prestasi.

- 2) Keadaan kahar (*force majeure*) karena keadaan memaksa

Sebab lain mengapa seorang Debitur dianggap dalam keadaan keadaan kahar (*force majeure*) adalah jika tidak terpenuhinya PKS, karena terjadinya keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari oleh Debitur, misalnya bencana alam, perang, kerusakan, dan lain-lain yang menyebabkan debitur menjadi terhalang memenuhi prestasi.

- 3) Keadaan kahar (*force majeure*) karena perbuatan tersebut dilarang

Hal ini terjadi apabila ternyata prestasi yang harus dilakukan oleh Debitur di kemudian hari ternyata diketahui sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Biasanya kondisi ini terjadi karena perubahan kebijakan Pemerintah atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum keadaan kahar (*force majeure*) adalah terhadap Debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi atau bunga akibat tidak terpenuhinya prestasi Debitur karena terjadinya keadaan keadaan kahar (*force majeure*).

j. Pengakhiran Kerja Sama

Pada umumnya, perjanjian berakhir karena ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata, yaitu karena dilakukannya pembayaran; penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (*konsinyasi*); pembaharuan utang (*novasi*); perjumpaan utang atau kompensasi (*set off*); pencampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang terutang; dan kebatalan atau pembatalan.

Klausula pengakhiran kerjasama penting untuk diatur dalam PKS Antar Daerah untuk mengetahui dengan cara apa PKS diakhiri. Yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan KSDD adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yang mengatur secara khusus KSDD, dimana penyelesaian perselisihan dilakukan secara non justisial atau tanpa melalui Pengadilan, sehingga tata cara pengakhiran PKS tidak terikat pada ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa Pihak yang berwenang mengakhiri PKS adalah Pengadilan. Oleh karena itu, maka pengaturan mengenai pengakhiran PKS merupakan klausula yang dapat mengecualikan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.

k. Pemberitahuan

Dalam pelaksanaan PKS seringkali diperlukan komunikasi untuk memberitahukan tentang hal tertentu dengan cara yang dapat dibuktikan oleh para Pihak. Komunikasi yang dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya bisa berakibat bahwa komunikasi itu tidak mengikat Pihak lainnya. Dengan demikian, ketidak-cermatan dalam komunikasi bisa menimbulkan akibat yang rumit.

Relevansi dan penetapan cara untuk memastikan komunikasi terletak pada risiko, bahwa kelalaian salah satu Pihak untuk melaksanakan komunikasi menurut yang telah disepakati, dapat menempatkannya dalam posisi cedera janji atau wanprestasi. Komunikasi harus dilakukan secara tertulis sebagaimana diatur dalam klausula PKS. Hal ini bisa dilakukan dengan surat-menyurat yang tercatat, faksimili, telepon maupun email.

l. Perubahan

Perubahan (*amandment*) yang lazim dikenal dengan *addendum* adalah perubahan terhadap klausula PKS berupa penambahan, perbaikan, perubahan atau pengurangan klausula yang merupakan klausula suplemen dari sebuah perjanjian pokok.

Biasanya *addendum* muncul karena adanya perubahan dari isi PKS, atau karena adanya hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya. Terhadap hal-hal tersebut, para Pihak dapat merundingkannya lebih lanjut dalam suatu musyawarah, dan hasil kesepakatannya itulah yang dituangkan ke dalam *addendum*. Pembuatan *addendum* semacam ini lebih praktis daripada membuat PKS baru yang dapat memakan waktu dan biaya tambahan.

Meskipun dalam perjanjian pokoknya tidak dimasukkan klausula mengenai *addendum*, hal tersebut tidak menyebabkan para Pihak tidak dapat membuat *addendum* di kemudian hari tahap pelaksanaan PKS. Para Pihak, setiap waktu, masih dapat melakukan perubahan atau penambahan terhadap isi PKS melalui *addendum*, sepanjang para Pihak menyepakatinya.

Secara fisik, *addendum* terpisah dari perjanjian induk, namun secara hukum suatu *addendum* melekat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian induk.

m. Lain-Lain

1) Dalam pasal ini dapat diatur bahwa pelaksanaan PKS KSDD tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara para pihak.

- 2) Disamping itu, dapat diatur pula apa yang akan disepakati oleh para pihak, dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau kondisi-kondisi di luar keadaan kahar (*force majeure*), yang tidak memungkinkan terselenggaranya PKS KSDD.

## 6. Penutup

Bagian ini mengakhiri batang tubuh penutup dengan identitas para Pihak dalam PKS serta hal-hal yang dianggap perlu dimuat untuk memberikan keabsahan yuridis pada PKS yang bersangkutan. Pada bagian akhir dari PKS, pada umumnya dimuat berbagai informasi penutup, meliputi :

- a. Tanggal dan tempat penandatanganan PKS oleh para Pihak (bila hal ini belum disebut di bagian pembukaan);
- b. Kolom-kolom untuk penandatanganan para Pihak atau wakil-wakil resmi dari para Pihak;
- c. Tanda pengenal/*cap/seal* dari para Pihak (khususnya bila para Pihak adalah badan hukum); dan
- d. Materai yang distempel dan dibubuhi tanggal pada saat PKS ditandatangani.

## D. PKS/Kontrak Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

### 1. Komparisi

Komparisi adalah bagian PKS/Kontrak Kerja Sama yang meliputi:

- a. Judul PKS/Kontrak Kerja Sama yang menjelaskan tentang judul PKS yang akan ditandatangani.
- b. Nomor PKS/Kontrak Kerja Sama. Apabila PKS/Kontrak Kerja Sama dibuat berupa perubahan PKS/Kontrak Kerja Sama, maka PKS/Kontrak Kerja Sama harus diberi urutan sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.
- c. Tanggal PKS/Kontrak Kerja Sama, yang menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun PKS/Kontrak Kerja Sama ditandatangani oleh para Pihak.
- d. Kalimat pembuka yang menjelaskan bahwa para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tertentu membuat dan menandatangani PKS/Kontrak Kerja Sama.

### 2. Para Pihak dalam PKS/Kontrak Kerja Sama

- a. Menjelaskan identitas para Pihak yang menandatangani PKS/Kontrak Kerja Sama. Identitas para Pihak meliputi : nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para Pihak dalam PKS/Kontrak Kerja Sama tersebut, apakah sebagai Pihak Kesatu atau Pihak Kedua dan seterusnya.
- b. Para Pihak dalam PKS/Kontrak Kerja Sama terdiri dari Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan seterusnya.
- c. Menjelaskan bahwa para Pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan atas dasar apa ia bertindak.

Dalam penandatanganan PKS/Kontrak Kerja Sama, Daerah harus diwakili oleh Kepala Daerah, Penjabat, Penjabat Sementara, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian Kepala Daerah. Pengecualian terhadap ketentuan ini apabila penandatanganan dikuasakan kepada salah seorang Pejabat berdasarkan Surat Kuasa. Namun demikian apabila PKS/Kontrak Kerja Sama ini merupakan implementasi dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka Kepala Perangkat Daerah menandatangani naskah PKS/Kontrak Kerja Sama tanpa Surat Kuasa.

Adapun yang mewakili Pihak Ketiga, adalah Direktur Utama atau yang setara dengan jabatan Direktur Utama, atau yang ditunjuk dalam Anggaran Dasar mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan, atau pejabat yang ditunjuk sdalam dokumen otorisasi perusahaan (persetujuan Komisaris).

Sedangkan untuk perseorangan yang menjadi Pihak pada PKS/Kontrak Kerja Sama, maka identitasnya harus dibuktika, dengan kartu tanda penduduk.

- d. Apabila Pihak Kedua merupakan suatu konsorsium, perusahaan patungan (*joint venture*) atau bentuk kerjasama lainnya harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin serta yang mewakili kerja sama tersebut.

#### 4. Premis (*Recital*)

- a. Premis merupakan penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya PKS/Kontrak Kerja Sama, berupa pertimbangan-pertimbangan umum. Pada bagian ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang terjadinya PKS/Kontrak Kerja Sama, selain itu premis merupakan bagian yang menjawab pertanyaan apa sebab kerjasama itu dibuat serta yang menyatakan adanya sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan
- b. Pada bagian ini sebaiknya memuat petunjuk bahwa setelah melalui proses penawaran, penerimaan tawaran dan negosiasi(*offer, acceptance, and negotiations*), para Pihak sepakat untuk mengadakan PKS/Kontrak Kerja Sama. Bagian ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan “konsiderans menimbang” dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Secara umum, premis terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu premis major berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi PKS/Kontrak Kerja Sama atau proses PKS/Kontrak Kerja Sama, dan premis minor berupa alasan hukum, kondisi umum dan latar belakang dibentuknya PKS/Kontrak Kerja Sama.

#### 5. Konsideran

Bagian ini merupakan pernyataan dari para Pihak berdasarkan kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing, setelah mempertimbangkan premis mayor dan premis minor, untuk melaksanakan PKS/Kontrak Kerja Sama.

#### 6. Isi PKS/Kontrak Kerja Sama

##### a. Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud PKS/Kontrak Kerja Sama adalah klausul yang menggambarkan apa yang melatarbelakangi diselenggarakannya PKS/Kontrak Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga. Dalam hal masih relevan, klausul maksud dalam PKS/Kontrak Kerja Sama dapat mengacu pada naskah Kesepakatan Bersama.
- 2) Tujuan PKS/Kontrak Kerja Sama adalah hasil akhir yang diinginkan dari pelaksanaan KSDPK. Dalam hal masih relevan, klausul tujuan dalam PKS/Kontrak Kerja Sama dapat mengacu pada naskah Kesepakatan Bersama KSDPK.

##### b. Objek

Objek PKS/Kontrak Kerja Sama pada prinsipnya terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu benda dan tak benda (aktivitas).

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PKS/Kontrak Kerja Sama adalah batasan mengenai apa yang disepakati oleh para pihak akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

d. Pelaksanaan

Dalam pasal yang mengatur tentang pelaksanaan, pada umumnya berisi pentahapan pelaksanaan PKS/Kontrak Kerja Sama, pembagian peran dari para pihak, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kerja sama secara umum.

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban menguraikan secara rinci hak dan kewajiban dari para Pihak yang diatur dalam PKS/Kontrak Kerja Sama. Klausul hak dan kewajiban memberikan hak untuk menuntut prestasi dari Pihak mitra sekaligus dituntut oleh Pihak mitra untuk melakukan prestasi. Rincian mengenai hak dan kewajiban para Pihak adalah bagian yang merupakan perumusan sesungguhnya dari suatu transaksi bisnis.

Hubungan antara hak dan kewajiban serta hubungan antara perangkat hak dan kewajiban dari para Pihak seyogianya merupakan hubungan yang logis. Oleh karena itu, perangkat hak adalah berbanding terbalik dengan perangkat kewajiban, walaupun hubungannya tidak linear. Pada umumnya, perangkat hak dan kewajiban salah satu Pihak berbanding terbalik dengan perangkat hak dan kewajiban Pihak lainnya.

f. Pembiayaan

Pasal ini mengatur klausul mengenai sumber pembiayaan untuk pelaksanaan dan seluruh pentahapan kerja sama, termasuk masalah pembayaran atau kontribusi yang harus dibayar oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya.

g. Peristiwa Cidera Janji (*Event of Default*)

Cidera janji terjadi karena debitur (*yang dibebani kewajiban*) tidak memenuhi isi PKS yang disepakati, seperti :

- 1) tidak dipenuhinya prestasi sama sekali;
- 2) tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi; dan/atau
- 3) tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan.

Terhadap Pihak yang melakukan ingkar janji (*wanprestatie*), maka untuk dapat menagih kepada Pihak mitra untuk memenuhi janji/prestasi yang telah disepakati, diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai, somasi atau peringatan.

h. Jangka Waktu

Klausul jangka waktu menunjukkan waktu mulai berlaku sampai berakhirnya PKS/Kontrak Kerja Sama. Pembatasan jangka waktu diperlukan untuk :

- 1) Menghindari berlakunya suatu PKS/Kontrak Kerja Sama yang tidak memberikan manfaat secara terus menerus;
- 2) Sebagai sarana evaluasi, dalam arti PKS/Kontrak Kerja Sama yang tidak memberikan manfaat tidak perlu diperbarui; dan
- 3) Memudahkan proses renegotiasi klausul PKS/Kontrak Kerja Sama yang kurang menguntungkan.

i. Hukum yang Berlaku (*Governing Law*)



Hukum yang berlaku atau pilihan hukum berakar dari prinsip asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang diterima hampir di seluruh sistem hukum. Dalam batas-batas tertentu, para Pihak diperkenankan untuk menentukan sendiri hal-hal yang mereka perjanjikan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan dicantumkan klausula pilihan hukum yang berlaku, maka pemeriksaan pendahuluan untuk memutuskan hukum yang dipergunakan tidak diperlukan lagi. Dengan demikian hal ini dapat menghemat waktu pemeriksaan perkara jika terjadi perselisihan.

j. Domisili (*Domicile*)

Domisili (*domicile* atau *woonplaats*) artinya tempat kedudukan hukum, yaitu tempat atau kota di mana seseorang atau badan hukum dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya.

k. Penyelesaian Perselisihan (*Dispute Settlement*)

Secara garis besar, model penyelesaian sengketa ada 2 (dua) macam, yaitu secara litigasi dan non-litigasi.

1) Litigasi

Litigasi adalah model penyelesaian sengketa dengan membawa sengketa tersebut ke Pengadilan. Kadang dalam sengketa keperdataan hal ini adalah hal terakhir yang ditempuh apabila model penyelesaian sengketa secara non-litigasi tidak menemui kesepakatan diantara kedua belah Pihak (*ultimum remedium*).

Tapi tidak jarang juga kita menemui sebuah kontrak yang langsung menggunakan litigasi sebagai satu-satunya model penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut (*premium remedium*).

2) Non-litigasi (*Alternative Dispute Resolution*)

Mekanisme penyelesaian sengketa ini disebut sebagai non-litigasi karena merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lembaga peradilan. Ada 4 (macam) metode penyelesaian sengketa non-litigasi yaitu :

a) Arbitrase

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka (1), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para Pihak yang bersengketa. Lembaga yang biasa ditunjuk untuk melaksanakan proses arbitrase secara nasional adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

b) Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan Pihak Ketiga yang netral (Mediator), yang secara aktif membantu Pihak-Pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua Pihak.

c) Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan komunikasi dua arah dari kedua belah Pihak yang bersengketa untuk merumuskan sebuah kesepakatan bersama.

#### d) Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya untuk mempertemukan kepentingan kedua belah Pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian bersama.

#### 1. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Penyebab keadaan kahar (*force majeure*) dalam KUH Perdata terdiri dari :

##### 1) Keadaan kahar (*force majeure*) karena sebab-sebab yang tidak terduga

Jika terjadi hal-hal yang tidak terduga sebelumnya oleh para Pihak yang menyebabkan terjadinya kegagalan melaksanakan PKS/Kontrak Kerja Sama, maka hal tersebut tidak tergolong kepada wanprestasi, akan tetapi termasuk ke dalam kategori keadaan kahar (*force majeure*). Terhadap kejadian seperti ini, Debitur atau pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Beban pembuktian terhadap terjadinya sebab-sebab tak terduga ini ada pada Debitur. Jika Debitur dapat dibuktikan dalam keadaan beritikad buruk, maka meskipun dalam keadaan keadaan kahar (*force majeure*), Debitur tetap harus bertanggungjawab atas kegagalannya memenuhi prestasi.

##### 2) Keadaan kahar (*force majeure*) karena keadaan memaksa

Sebab lain mengapa seorang Debitur dianggap dalam keadaan keadaan kahar (*force majeure*) adalah jika tidak terpenuhinya PKS/Kontrak Kerja Sama, karena terjadinya keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari oleh Debitur, misalnya bencana alam, perang, kerusuhan, dan lain-lain yang menyebabkan debitur menjadi terhalang memenuhi prestasi.

##### 3) Keadaan kahar (*force majeure*) karena perbuatan tersebut dilarang

Hal ini terjadi apabila ternyata prestasi yang harus dilakukan oleh Debitur di kemudian hari ternyata diketahui sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Biasanya kondisi ini terjadi karena perubahan kebijakan Pemerintah atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum keadaan kahar (*force majeure*) adalah terhadap Debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi atau bunga akibat tidak terpenuhinya prestasi Debitur karena terjadinya keadaan keadaan kahar (*force majeure*).

#### m. Pengakhiran Kerja Sama (*Termination*)

Pada umumnya, perjanjian berakhir karena ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata, yaitu karena dilakukannya pembayaran; penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (*konsinyasi*); pembaharuan utang (*novasi*); perjumpaan utang atau kompensasi (*set off*); pencampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang terutang; dan pembatalan atau pembatalan.

Klausula pengakhiran kerjasama penting untuk diatur dalam PKS/Kontrak Kerja Sama untuk mengetahui dengan cara apa

PKS/Kontrak Kerja Sama diakhiri. Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan bahwa Pihak yang berwenang mengakhiri PKS/Kontrak Kerja Sama adalah Pengadilan. Namun demikian, sesuai dengan asas mengikat sebagai undang-undang dan asas kebebasan berkontrak, pengaturan mengenai pengakhiran PKS/Kontrak Kerja Sama merupakan klausula yang dapat mengecualikan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Dengan demikian, para Pihak dapat menyepakati cara lain di luar ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, misalnya arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.

n. Pemberitahuan (*Notice*)

Dalam pelaksanaan PKS/Kontrak Kerja Sama seringkali diperlukan komunikasi untuk memberitahukan tentang hal tertentu dengan cara yang dapat dibuktikan oleh para Pihak. Komunikasi yang dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya bisa berakibat bahwa komunikasi itu tidak mengikat Pihak lainnya. Dengan demikian, ketidak-cermatan dalam komunikasi bisa menimbulkan akibat yang rumit.

Relevansi dan penetapan cara untuk memastikan komunikasi terletak pada risiko, bahwa kelalaian salah satu Pihak untuk melaksanakan komunikasi menurut yang telah disepakati, dapat menempatkannya dalam posisi cedera janji atau wanprestasi. Komunikasi harus dilakukan secara tertulis sebagaimana diatur dalam klausula PKS/Kontrak Kerja Sama. Hal ini bisa dilakukan dengan surat-menyerat yang tercatat, faksimili, telepon maupun email.

o. Kerahasiaan (*Confidentially*)

Pencantuman klausula kerahasiaan mempunyai tujuan mengatur hal-hal yang menjadi rahasia, dapat berupa data-data atau informasi yang mempunyai nilai ekonomi atau Hak Kekayaan Intelektual karena berguna dalam kegiatan usaha, sehingga perlu dijamin kerahasiaannya oleh para Pihak. Klausula ini harus dituangkan dalam PKS/Kontrak Kerja Sama agar jaminan kerahasiaan data maupun informasi para Pihak tidak tersebar kepada Pihak lain sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi para Pihak.

p. Perubahan Peraturan (*Change of Law*)

Dalam hal setelah ditandatanganinya PKS/Kontrak Kerja Sama terjadi suatu perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu Pihak, maka para Pihak seyogianya telah menetapkan klausula yang menyepakati untuk mengadakan perundingan kembali, sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak.

q. Keseluruhan Perjanjian (*Entire Agreement*)

PKS/Kontrak Kerja Sama merupakan bagian dalam suatu rangkaian pembicaraan, kesepakatan dan bahkan perjanjian-perjanjian lain, sehingga dipandang perlu untuk menyatakan bahwa suatu PKS/Kontrak Kerja Sama merupakan suatu kesepakatan yang bersifat final, dengan pengaturan :

- 1) PKS/Kontrak Kerja Sama yang berakhir dinyatakan sebagai PKS/Kontrak Kerja Sama yang terakhir dan satu-satunya yang mengatur seluruh transaksi;

- 2) PKS/Kontrak Kerja Sama yang terakhir dinyatakan berlaku bersama seluruh PKS/Kontrak Kerja Sama dan kesepakatan yang dibuat sebelumnya; dan
- 3) Seluruh PKS/Kontrak Kerja Sama dan kesepakatan yang dibuat sebelum PKS/Kontrak Kerja Sama yang terakhir dinyatakan tetap berlaku, kecuali jika diatur lain dalam PKS/Kontrak Kerja Sama yang terakhir.

r. Keterpisahan Perjanjian (*Severability*)

Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam PKS/Kontrak Kerja Sama dinyatakan sebagai suatu yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan tertentu atau sebagian dari suatu klausul. Sedangkan ketentuan lainnya dalam PKS/Kontrak Kerja Sama tetap berlaku dan mempunyai ketentuan hukum secara penuh. Ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sedapat mungkin tetap mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh para Pihak.

s. Pengalihan Hak (*Assignment of Right*)

Dalam PKS/Kontrak Kerja Sama perlu ditegaskan apakah PKS/Kontrak Kerja Sama tersebut dapat atau tidak dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga. Masalah pengalihan berkaitan dengan :

1) Timbal balik (*resiprositas*) pengalihan PKS/Kontrak Kerja Sama

Pelimpahan hak atau peniadaan hak untuk mengalihkan kedudukan dalam PKS/Kontrak Kerja Sama dapat bersifat timbal balik atau bersifat sepihak.

Pada PKS/Kontrak Kerja Sama dimana kedudukan para Pihak setara, biasanya pengalihan PKS/Kontrak Kerja Sama bersifat timbal balik.

2) Pengalihan menyeluruh atau sebagian

Pada sebagian PKS/Kontrak Kerja Sama dimungkinkan dilakukannya pengalihan kontraktual yang bersifat sebagian atau menyeluruh. Sedangkan PKS/Kontrak Kerja Sama lain hanya mengizinkan pengalihan kontraktual dalam suatu PKS/Kontrak Kerja Sama, yang dikenal dengan sub kontrak.

3) Pengalihan yang tidak diatur sebelumnya

Kadang-kadang terjadi, bahwa suatu PKS/Kontrak Kerja Sama tidak mengatur, apakah kedudukan para Pihak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam keadaan demikian berlaku kaidah pokok, bahwa dalam hal terjadi perubahan terhadap pelaksanaan PKS/Kontrak Kerja Sama, mensyaratkan persetujuan timbal balik dari para Pihak.

Pengalihan hak dan/atau kewajiban dalam PKS/Kontrak Kerja Sama kepada Pihak Ketiga harus ditegaskan dengan persetujuan para Pihak, dengan ketentuan :

- 1) Pihak yang mengalihkan hak dan/atau kewajiban tetap menjadi Pihak dalam PKS/Kontrak Kerja Sama;
- 2) Pihak yang mengalihkan hak dan/atau kewajiban mengundurkan diri dari PKS/Kontrak Kerja Sama; dan

3) Pihak yang mengalihkan hak dan/atau kewajiban menjadi Pihak baru dalam PKS/Kontrak Kerja Sama.

t. Perubahan (*Amandment*)

Perubahan (*amandment*) yang lazim dikenal dengan *addendum* adalah perubahan terhadap klausula PKS/Kontrak Kerja Sama berupa penambahan, perbaikan, perubahan atau pengurangan klausula yang merupakan klausula suplemen dari sebuah perjanjian pokok.

Biasanya *addendum* muncul karena adanya perubahan dari isi PKS/Kontrak Kerja Sama, atau karena adanya hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya. Terhadap hal-hal tersebut, para Pihak dapat merundingkannya lebih lanjut dalam suatu musyawarah, dan hasil kesepakatannya itulah yang dituangkan ke dalam *addendum*.

Pembuatan *addendum* semacam ini lebih praktis daripada membuat PKS/Kontrak Kerja Sama baru yang dapat memakan waktu dan biaya tambahan.

Meskipun dalam perjanjian pokoknya tidak dimasukkan klausula mengenai *addendum*, hal tersebut tidak menyebabkan para Pihak tidak dapat membuat *addendum* di kemudian hari tahap pelaksanaan PKS/Kontrak Kerja Sama. Para Pihak, setiap waktu, masih dapat melakukan perubahan atau penambahan terhadap isi PKS/Kontrak Kerja Sama melalui *addendum*, sepanjang para Pihak menyepakatinya.

Secara fisik, *addendum* terpisah dari perjanjian induk, namun secara hukum suatu *addendum* melekat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian induk.

u. Lain-Lain

1) Dalam pasal ini dapat diatur bahwa pelaksanaan PKS/Kontrak Kerja Sama tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara para pihak.

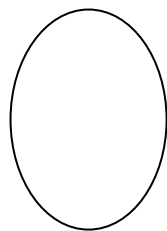
2) Disamping itu, dapat diatur pula apa yang akan disepakati oleh para pihak, dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau kondisi-kondisi di luar keadaan kahar (*force majeure*), yang tidak memungkinkan terselenggaranya PKS/Kontrak Kerja Sama.

## 7. Penutup

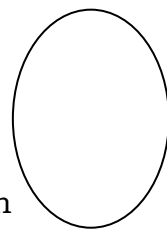
Bagian ini mengakhiri batang tubuh penutup dengan identitas para Pihak dalam PKS/Kontrak Kerja Sama serta hal-hal yang dianggap perlu dimuat untuk memberikan keabsahan yuridis pada PKS/Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan. Pada bagian akhir dari PKS/Kontrak Kerja Sama, pada umumnya dimuat berbagai informasi penutup, meliputi :

- a. Tanggal dan tempat penandatanganan PKS/Kontrak Kerja Sama oleh para Pihak (bila hal ini belum disebut di bagian pembukaan);
- b. Kolom-kolom untuk penandatanganan para Pihak atau wakil-wakil resmi dari para Pihak;
- c. Tanda pengenal/*cap/seal* dari para Pihak (khususnya bila para Pihak adalah badan hukum); dan
- d. Materai yang distempel dan dibubuhi tanggal pada saat PKS/Kontrak Kerja Sama ditandatangani.

6. Contoh Format PKS KSDD



Lambang Daerah



Lambang Daerah

PKS

ANTARA

PEMERINTAHDAERAH .....

DAN

PEMERINTAHDAERAH .....

TENTANG

.....

NOMOR : .....

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. .... : .....  
 ..... (nama tanpa gelar) berkedudukandi....., Jalan  
 ....., berdasarkan Surat  
 Kuasa Khusus  
 Gubernur/Bupati/Wali Kota\*  
 ..... Nomor  
 .....tanggal .....  
 dalam hal ini bertindak untuk  
 dan atas nama Pemerintah Daerah  
 ....., selanjutnya disebut  
 PIHAK KESATU.
- II. .... : .....  
 ..... (nama tanpa gelar) berkedudukandi....., Jalan  
 ....., berdasarkan Surat  
 Kuasa Khusus  
 Gubernur/Bupati/Wali Kota\*  
 ..... Nomor  
 .....tanggal .....  
 dalam hal ini bertindak untuk  
 dan atas nama Pemerintah Daerah  
 ....., selanjutnya disebut  
 PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. .... dst
- 2. .... dst
- 3. .... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan

PKS ..... ,  
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

.....  
.....  
.....

Pasal 2  
OBJEK PERJANJIAN

.....  
.....  
.....

Pasal 3

.....  
.....  
.....

Pasal 4

.....  
.....  
.....

Pasal ..  
dan seterusnya

.....  
.....  
.....

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Cap dan Tandatangani

Cap dan Tandatangani

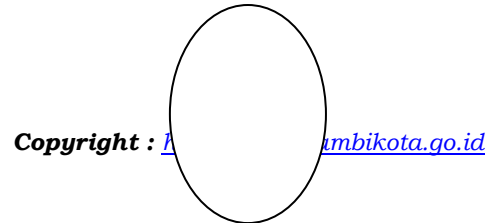
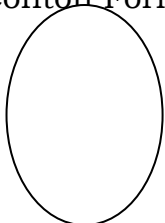
.....

.....

(nama tanpa gelar)

(nama tanpa gelar)

7. Contoh Format PKS KSDPK



Lambang Daerah

Logo Pihak Ketiga

PKS/KONTRAK KERJA SAMA\*

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH .....

DAN

PT. ....

TENTANG

.....

NOMOR : .....

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. .... : .....,  
..... (nama tanpa gelar) berkedudukan di ....., Jalan ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota ..... Nomor ..... tanggal ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. .... : .....,  
..... (nama tanpa gelar) berkedudukan di ....., Jalan ..... berdasarkan Anggaran Dasar PT. .... yang dibuat di hadapan Notaris ....., yang telah disahkan oleh Menteri ..... berdasarkan Keputusan Nomor ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. .... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS/Kontrak Kerja Sama\* ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. ....dst
2. .... dst
3. ....dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan PKS/Kontrak Kerja Sama\* ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

.....  
.....  
.....

Pasal 2  
OBJEK PERJANJIAN

.....  
.....  
.....

Pasal 3

.....  
.....  
.....

Pasal 4

.....  
.....  
.....

Pasal ..  
dan seterusnya

.....  
.....  
.....

Demikian PKS/Kontrak Kerja Sama\* ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Cap dan Tandatangan

Cap dan Tandatangan

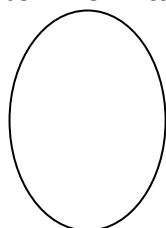
.....

.....

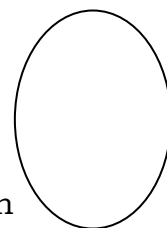
(nama tanpa gelar)

(nama tanpa gelar)

8. Contoh Format PKS KSDPL



Lambang Daerah



Lambang Daerah

PKS  
ANTARA  
PEMERINTAHDAERAH .....  
DAN  
PEMERINTAHDAERAH .....  
TENTANG

.....

NOMOR : .....

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. .... : .....,  
..... (nama tanpa gelar) berkedudukandi....., Jalan .....  
....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota ..... Nomor ..... tanggal .....  
....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. .... : .....,  
..... (nama tanpa gelar) berkedudukandi....., Jalan .....  
....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus ..... Nomor ..... tanggal .....  
....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. .... dst
2. .... dst
3. .... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan PKS ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

.....  
.....  
.....

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

.....  
.....  
.....

Pasal 3

.....

.....  
.....  
.....

Pasal 4

.....

.....  
.....  
.....

Pasal ..

dan seterusnya

.....  
.....  
.....

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Cap dan Tandatangan

Cap dan Tandatangan

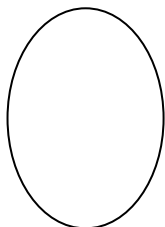
.....

(nama tanpa gelar)

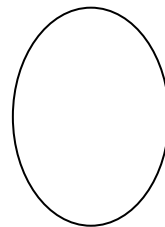
.....

(nama tanpa gelar)

9. Contoh Format PKS KSDLL



Lambang Daerah



Logo Lembaga

PKS/KONTRAK KERJA SAMA\*

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH .....

DAN

.....

TENTANG

.....

NOMOR : .....

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.-.-.-.), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. .... : .....,  
..... (nama tanpa gelar) berkedudukandi....., Jalan ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota ..... Nomor ..... tanggal ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. .... : .....,  
..... (nama tanpa gelar) berkedudukandi....., Jalan ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS/Kontrak Kerja Sama\* ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. ....dst
- 2. .... dst
- 3. ....dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan PKS/Kontrak Kerja Sama\* ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

.....  
.....  
.....

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

.....  
.....  
.....

Pasal 3

.....

.....  
.....  
.....

Pasal 4

.....

.....  
.....  
.....

Pasal ..

dan seterusnya

.....  
.....  
.....

Demikian PKS/Kontrak Kerja Sama\* ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Cap dan Tandatangan

Cap dan Tandatangan

.....

.....

(nama tanpa gelar)

(nama tanpa gelar)

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA